

Framing Detik.com dan Tempo.co Mengenai Proyek Ibu Kota Nusantara pada 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran

Qais Abhitah Gustriatama¹; Ahmad Zamzamy²

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
gustriatamaqais@gmail.com¹; ahmadzamzamy83@gmail.com²

ABSTRACT

The research "Framing Online Media Coverage by Detik.com and Tempo.co on the Nusantara Capital Project during the First 100 Days of the Prabowo-Gibran Administration" aims to understand how Detik.com and Tempo.co frame news about the Nusantara Capital Project during the first 100 days of the Prabowo-Gibran administration, published from October 20, 2024, to January 28, 2025. This research is a qualitative descriptive study using Robert N. Entman's framing model, which has four analytical devices: defining the problem, determining the cause of the problem, making a moral judgment, and recommending a solution. The data sources come from three news articles published by Detik.com and three news articles published by Tempo.co. The research results show that the online media Detik.com and Tempo.co frame the sustainability of the Nusantara Capital City (IKN) development project from different perspectives. Detik.com emphasizes the sustainability of the IKN project as a priority for the Prabowo-Gibran administration. Tempo.co highlights the need for a reevaluation of the IKN project by the new administration.

Keywords: Framing Analysis; Nusantara Capital City; Robert N. Entman

ABSTRAK

Penelitian "Framing Pemberitaan Media Online Detik.com dan Tempo.co mengenai Proyek Ibu Kota Nusantara pada 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran" bertujuan untuk mengetahui media Detik.com dan Tempo.co dalam membingkai berita mengenai proyek Ibu Kota Nusantara pada 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang terbit pada 20 Oktober 2024 hingga 28 Januari 2025. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan model *framing* Robert N. Entman yang memiliki empat perangkat analisis, yaitu pendefinisikan masalah, penentuan penyebab masalah, pembuatan penilaian moral, dan perekomendasi solusi. Sumber data berasal dari tiga berita yang diterbitkan oleh Detik.com dan tiga berita yang diterbitkan oleh Tempo.co. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media *online* Detik.com dan Tempo.co membingkai keberlanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan sudut pandang yang berbeda. Detik.com menekankan keberlanjutan proyek IKN sebagai prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Tempo.co menyoroti perlunya evaluasi ulang terhadap proyek IKN oleh pemerintahan yang baru.

Kata Kunci: Analisis Framing; Ibu Kota Nusantara; Robert N. Entman

PENDAHULUAN

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dikukuhkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI ke delapan. Pengukuhan ini dilakukan 20 Oktober 2024 yang menandai dimulainya pemerintahan baru yang membawa berbagai agenda strategis, salah satunya adalah kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Perhatian terhadap proyek tersebut semakin meningkat ketika dalam salah satu rapat awal pasca pelantikan presiden dan wakil presiden, Prabowo menekankan kembali pentingnya percepatan pembangunan IKN sebagai agenda prioritas nasional. Langkah ini menunjukkan bentuk komitmen yang telah ia sampaikan sejak masa kampanye. Selama Pilpres 2024, Prabowo secara konsisten menegaskan dukungannya terhadap proyek IKN sebagai bagian dari visi pembangunan jangka panjang Indonesia (Nugraheny, 2024).

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan upaya yang dilakukan dengan maksud ingin memindahkan pusat pemerintahan yang sebelumnya berada di DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Tujuan utamanya ialah mengurangi beban infrastruktur di Jakarta, mendorong pemerataan pembangunan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur. Infrastruktur utama, termasuk Istana Kepresidenan, perumahan ASN, infrastruktur transportasi, pemukiman, fasilitas pemerintah, dan layanan utilitas, telah diberikan perhatian khusus di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran dengan fokus pada percepatan penyelesaian tahap pertama (Soemardi & Waty, 2025).

Berbagai media *online* nasional di Indonesia berlomba-lomba memberikan informasi yang akurat mengenai proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Media *online* nasional yang banyak menyoroti isu ini adalah Detik.com dan Tempo.co. Dua media ini aktif melaporkan perkembangan, kebijakan baru, dan langkah-langkah percepatan pembangunan IKN yang diusung oleh pemerintahan baru. Menurut Nasution et al (2022) proses pemberitaan setiap media *online* memiliki kecenderungan untuk membingkai suatu peristiwa dengan sudut pandang tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Hal ini berpotensi menghasilkan perbedaan narasi di masyarakat terkait proyek IKN, bergantung pada bagaimana media mengemas dan menyajikan informasi. Detik.com dan Tempo.co adalah dua media dimana memiliki perbedaan pendekatan editorial sehingga menampilkan perspektif yang beragam dalam pemberitaan proyek IKN selama 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Strategi *framing* yang digunakan dalam pemberitaan ini berperan dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan serta arah proyek IKN di masa depan.

Pendekatan *framing* dipakai untuk melihat sejauh mana media merancang cara pandang tertentu terhadap suatu fakta atau kenyataan. *Framing* merupakan metode penyajian realitas hal ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana jurnalis memilih topik dan menulis berita dari perspektif atau sudut pandang mereka. *Framing* dilakukan dengan melibatkan penggunaan kata-kata dengan makna tertentu, menekankan elemen-elemen tertentu, dan memanfaatkan gambar, karikatur, dan alat bantu visual lainnya. Eriyanto (2011) menyatakan bahwa perspektif ini nantinya dapat memilih fakta yang digunakan, informasi yang

ditonjolkan dan dihilangkan, serta arah berita. Menganalisis dan memahami realitas yang melibatkan individu, peristiwa, organisasi, dan hal-hal lain yang dibingkai oleh media adalah pengertian lain dari pendekatan *framing*.

Pendekatan *framing* yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *framing* model Robert N. Entman. Menurut Fadli et al. (2021), pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan gambaran bagaimana seleksi isu diproses dan ditonjolkan dengan aspek tertentu dari realitas oleh media. Hal ini menjadi upaya media untuk menonjolkan beberapa elemen dari realitas sosial hingga mampu membentuk cara pandang khalayak. *Framing* tidak terbatas pada apa yang diberitakan, tetapi juga bagaimana suatu isu dikemas agar dapat memengaruhi pemahaman publik. Anggoro (2014) mengatakan bahwa analisis *framing* Entman menjadi metode yang digunakan dalam studi media dan komunikasi yang berfokus pada bagaimana media membentuk sudut pandang tertentu terhadap suatu isu. Model ini terdiri dari empat struktur, yaitu *define problem* (mendefinisikan masalah), *diagnose causes* (menentukan penyebab permasalahan), *make moral judgement* (menentukan penilaian moral), dan *treatment recommendation* (menawarkan penuntasan masalah). Keempat struktur ini dapat mengungkap cara media membingkai suatu peristiwa dan bagaimana pembingkaiannya tersebut memengaruhi opini publik.

Struktur *framing* model Entman digunakan Detik.com dan Tempo.co untuk membentuk sudut pandang tertentu mengenai proyek IKN. Cara media mendefinisikan masalah, menyoroti penyebab, serta membuat penilaian dan rekomendasi akan memengaruhi bagaimana publik memahami isu IKN. Oleh karena itu, analisis terhadap berita di dua media ini akan melibatkan pemeriksaan terhadap judul, isi pemberitaan, dan penyajian informasi guna melihat bagaimana *framing* digunakan untuk membentuk persepsi publik. Perbedaan *framing* ini tidak terlepas dari latar belakang editorial dan kepemilikan media yang dapat memengaruhi bagaimana suatu isu dikontekstualisasikan dan disampaikan kepada audiens.

Penelitian mengenai penerapan analisis *framing* dalam pemberitaan media daring telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yakni Suryawati & Ulfa (2020) menganalisis konstruksi berita politainment anggota DPR RI Mulan Jameela dan Krisdayanti di Tribunnews.com dan Detik.com menggunakan model *framing* Zhongdang Pan dan Kosicki. Selanjutnya, ada penelitian Nurhayati et al (2021) yang menganalisis *framing* Kompas.com dan Liputan6.com tentang kasus glorifikasi Saipul Jamil dengan *framing* model Robert N. Entman. Prawira (2021) melakukan analisis *framing* tentang pemberitaan UU Cipta Kerja oleh Kompas.com dan Antaraneews.com melalui model *framing* Zhongdang Pan dan Kosicki. Lalu, Insani & Zamzamy (2023) yang menganalisis *framing* pemberitaan media *online* CNBC Indonesia.com dan Kompas.com mengenai dampak lingkungan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan dengan *framing* model Pan dan Kosicki. Berikutnya, Widayaya & Setiawan (2023) menganalisis *framing* dengan model Robert N. Entman tentang representasi publik figur politik pada Episode 'Dosa-Dosa Anies' di Program 'Kick Andy' Metro TV.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas. Objek penelitian ini dititikberatkan pada pemberitaan proyek Ibu Kota

Nusantara (IKN) dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Meskipun menggunakan model analisis yang sama, penelitian ini hanya akan mengkaji sudut pandang dua media *online* Detik.com dan Tempo.co. Dua media ini memiliki perbedaan *framing* karena masing-masing media berbeda kepemilikan dan ideologi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model analisis *framing* Entman untuk melihat bagaimana *framing* kedua media tersebut dalam membingkai pemberitaan mengenai proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang dapat membantu memaknai sebuah peristiwa yang diberitakan.

Masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah bagaimana *framing* pemberitaan media *online* Detik.com dan Tempo.co mengenai proyek Ibu Kota Nusantara pada 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Tujuan untuk mengetahui *framing* pemberitaan media *online* Detik.com dan Tempo.co mengenai proyek Ibu Kota Nusantara pada 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dalam melihat suatu peristiwa dari berbagai perspektif yang berbeda sehingga masyarakat lebih mengetahui bahwa setiap media mungkin memiliki sudut pandang tertentu dalam membuat berita.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menginterpretasikan peristiwa yang dialami subjek penelitian, seperti tingkah laku atau pendapat. Kemudian, mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata biasa. Moleong (2017) mengartikan penelitian kualitatif sebagai proses naturalistik yang dilakukan dengan tujuan memperoleh pemahaman mengenai peristiwa sosial secara alamiah. Artinya, fenomena yang diteliti diamati sebagaimana adanya dalam kehidupan nyata. Sementara Safrudin et al (2023) mengatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha menggali cara individu memahami dan mengalami suatu peristiwa untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang pandangan manusia dalam situasi sosial.

Data dari penelitian ini ialah berita mengenai proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Sumber data diambil dari berita yang diterbitkan oleh Detik.com dan Tempo.co. Penelitian ini menggunakan 5 berita dari masing-masing media *online* tersebut yang terbit pada 20 Oktober 2024 hingga 28 Januari 2025. Rentang waktu tersebut dipilih karena menunjukkan waktu 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Sapahuma (2015), konsep 100 hari kerja sering digunakan sebagai periode awal untuk menilai arah kebijakan dan efektivitas pemerintahan baru dalam menjalankan janji kampanye dan menetapkan prioritas.

Berikut daftar berita yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Data Penelitian

No	Judul Berita	Publikasi
Detik.com		
1.	Prabowo Lanjutkan Pembangunan IKN!	21 Oktober 2024
2.	Prabowo Kejar IKN Beres 4 Tahun, Tunjuk Basuki Lanjut Jadi Bos Otorita	28 Oktober 2024
3.	Dua Perintah Terbaru dari Prabowo soal Proyek IKN	20 November 2024
Tempo.co		
1.	Prabowo Tak Singgung IKN dalam Pidato seusai Pelantikan Presiden, PDIP: Belum Prioritas	20 Oktober 2024
2.	Menteri PU Ingin Memperlambat Pembangunan IKN, Otorita: Target Tetap 2028	31 Oktober 2024
3.	Menteri Hukum: Selama Infrastruktur di IKN Belum Rampung, Ibukota Masih di Jakarta	18 November 2024

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis *framing* Entman. Lindawati (2015) mengatakan bahwa teknik analisis data ini memiliki tujuan mengelompokkan dan memilah data menjadi kesatuan yang bertujuan untuk dikelola, ditentukan, dan menyintesis data sehingga dapat ditarik sebagai hasil dalam penelitian. Melalui analisis ini, dapat dipahami bagaimana Detik.com dan Tempo.co menyusun, menyoroti, dan menyajikan informasi sehingga menghasilkan konstruksi pesan di kalangan pembaca. Eriyanto (2022) menerangkan bahwa proses ini dilalui dengan penerapan model *framing* Entman yang mencakup empat struktur untuk membingkai isu proyek Ibu Kota Nusantara, yaitu *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (menentukan sebab masalah), *make moral judgement* (membuat penilaian moral), dan *treatment recommendation* (merekomendasikan penuntasan masalah).

Define problem menyoroti bagaimana suatu isu dipilih, dilihat, dan dimaknai oleh wartawan dalam pemberitaan. Setiap wartawan memiliki perspektif yang berbeda dalam menilai suatu peristiwa, bukan karena ada yang benar atau salah, tetapi karena sudut pandang yang dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan mereka. *Diagnose causes* menentukan siapa atau akar dari hal-hal yang dianggap sebagai sebab dari peristiwa tersebut. Setiap wartawan bisa memiliki pandangan yang berbeda dalam mengidentifikasi aktor atau faktor penyebab, tergantung pada sudut pandang mereka. *Make moral judgement* memberikan justifikasi atau argumentasi terhadap masalah yang telah didefinisikan sebelumnya. *Treatment recommendation* menawarkan solusi atau langkah-langkah yang dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah. Dalam praktiknya, rekomendasi yang diberikan bisa mendukung kebijakan tertentu, menyerukan tindakan dari pihak berwenang, atau bahkan menggiring opini publik agar mengambil sikap tertentu terhadap peristiwa yang diberitakan (Entman, 1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini memilih berita yang membahas tentang proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Berikut adalah hasil dari penggalan data dari *framing* Detik.com dan Tempo.co mengenai tentang proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan analisis *framing* model Entman melalui empat struktur.

Detik.com

Tabel 2. "Prabowo Lanjutkan Pembangunan IKN!"

<i>define problems</i>	Keberlanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di awal pemerintahan Prabowo-Gibran karena pemerintahan sebelumnya belum menyelesaikan proyek tersebut.
<i>diagnose causes</i>	Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan kepastian terkait keberlanjutan proyek IKN sejak pelantikan presiden dan wakil presiden dilakukan.
<i>make moral judgement</i>	Pemerintahan Prabowo-Gibran akan bertanggung jawab memastikan proyek IKN akan dilanjutkan.
<i>treatment recommendation</i>	Pemerintahan Prabowo-Gibran akan menyelesaikan pembangunan IKN yang sudah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya.

Tabel 3. "Prabowo Kejar IKN Beres 4 Tahun, Tunjuk Basuki Lanjut Jadi Bos Otorita"

<i>define problems</i>	Penetapan target penyelesaian Pembangunan IKN dalam waktu empat tahun oleh Presiden Prabowo.
<i>diagnose causes</i>	Tidak adanya struktur kepemimpinan IKN yang jelas sehingga ditakutkan proyek IKN tidak selesai dalam target yang telah ditetapkan.
<i>make moral judgement</i>	Pemerintah diminta untuk menjadwalkan pengangkatan Basuki sebagai Kepala Otorita IKN.
<i>treatment recommendation</i>	Pengangkatan Basuki sebagai Kepala Otorita IKN.

Tabel 4. "Dua Perintah Terbaru dari Prabowo soal Proyek IKN"

<i>define problems</i>	Target tahap pertama penyelesaian pembangunan IKN ditetapkan pada tahun 2024.
<i>diagnose causes</i>	Kapasitas hunian dan perkantoran belum mencukupi untuk kabinet Merah-Putih.
<i>make moral judgement</i>	Kepala Otorita IKN menyatakan akan melakukan pembangunan tambahan untuk kelengkapan hunian

	dan perkantoran sesuai dengan kebutuhan pemerintahan Prabowo-Gibran.
<i>treatment recommendation</i>	Pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap pada 2025 sambil menunggu kelengkapan pembangunan hunian dan perkantoran.

Tempo.co

Tabel 5. "Prabowo Tak Singgung IKN dalam Pidato seusai Pelantikan Presiden, PDIP: Belum Prioritas"

<i>define problems</i>	Presiden Prabowo tidak menyebutkan proyek IKN pada pidato pertama setelah pelantikannya.
<i>diagnose causes</i>	Kondisi keuangan negara yang terbatas karena memiliki utang senilai Rp 800 triliun.
<i>make moral judgement</i>	Pembangunan proyek IKN dinilai kurang tepat di tengah kondisi anggaran yang terbatas.
<i>treatment recommendation</i>	Pemerintah diminta melakukan penundaan untuk melanjutkan pembangunan IKN.

Tabel 6. "Menteri PU Ingin Memperlambat Pembangunan IKN, Otorita: Target Tetap 2028"

<i>define problems</i>	Keputusan pemerintah yang menyatakan akan memperlambat laju pembangunan IKN.
<i>diagnose causes</i>	Kekhawatiran Presiden Prabowo terhadap situasi geopolitik global yang tengah memanas dan belum tercapainya swasembada pangan.
<i>make moral judgement</i>	Pemerintah perlu mengutakan program swasembada pangan.
<i>treatment recommendation</i>	Pembangunan IKN diminta untuk dilakukan secara bertahap. Namun, target penyelesaian tetap pada tahun 2028.

Tabel 7. "Menteri Hukum: Selama Infrastruktur di IKN Belum Rampung, Ibukota Masih di Jakarta"

<i>define problems</i>	Penundaan pemindahan ibu kota negara ke IKN dari Jakarta.
------------------------	---

<i>diagnose causes</i>	Infrastruktur dasar di IKN masih belum selesai dibangun.
<i>make moral judgement</i>	Pemerintah menegaskan menyelesaikan pembangunan lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif di IKN.
<i>treatment recommendation</i>	Pemerintah menyelesaikan pembangunan di IKN secara bertahap dengan mengutamakan tiga infrastruktur dasar.

Pembahasan

Analisis Framing Detik.com

Detik.com turut memberitakan Ibu Kota Nusantara (IKN). Detik.com membingkai proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan sudut pandang yang positif. Pemberitaan di media ini menonjolkan optimisme pemerintah baru era Prabowo-Gibran terhadap keberlanjutan proyek, kemajuan pembangunan, dan kerja cepat OIKN sebagai bagian dari legitimasi program pemerintah yang sedang berjalan. Analisis *framing* oleh Detik.com dilakukan pada tiga berita berikut.

Framing 1

Berita pertama dibingkai oleh Detik.com pada 21 Oktober 2024 dengan judul "Prabowo Lanjutkan Pembangunan IKN!". Berita ini menerangkan penegasan Presiden Prabowo Subianto terkait proyek Ibu Kota Nusanbara (IKN) yang menjadi satu dari dua prioritas pembangunan infrastruktur untuk dikerjakan pada 100 hari pemerintahannya. Berikut penjelasan *framing* terhadap berita tersebut.

Define problems.

Pendefinisian masalah pada berita ini ditekankan pada proyek IKN yang baru masif dikerjakan pada tahun 2022 dengan pembangunan Istana Negara dan beberapa kantor kementerian padahal sudah diumumkan sejak tahun 2019. Hal ini memicu pertanyaan terkait bagaimana keberlanjutan penyelesaian proyek IKN di awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

"IKN sendiri sebelumnya dibesut langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), mega proyek ibu kota baru ini sudah diumumkan sejak 2019. Kemudian pembangunan baru masif sekitar dua tahun ke belakang, sudah ada Istana Negara dan beberapa kantor kementerian yang sudah dibangun di IKN."

Diagnose causes

Keberlanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dipertanyakan di awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini terjadi karena sejak pelantikan, Presiden Prabowo belum memberikan kepastian mengenai waktu pelaksanaan *groundbreaking* di IKN. Wamen PU, Diana, menyampaikan pelaksanaan *groundbreaking* masih menunggu informasi lebih lanjut dari Presiden Prabowo secara langsung sehingga masih belum bisa dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Ketika ditanya apakah Prabowo akan mengikuti gaya Jokowi yang sering ikut turun melakukan groundbreaking proyek di IKN, sampai saat ini Diana masih belum tahu. Dirinya masih menunggu informasi berikutnya secara langsung dari Prabowo”.

Make moral judgement.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana, menjelaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan melanjutkan proyek IKN yang sudah berjalan. Penilaian moral berita ini dilihat dari upaya pemerintah untuk melanjutkan penyelesaian pembangunan IKN yang sudah dimulai. Pemerintah di sini bertanggung jawab memastikan bahwa proyek yang sudah dibangun tidak akan berhenti begitu saja. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Kita akan lanjutkan yang sudah jalan. Kita selesaikan semuanya. Yang baru-baru nanti akan didiskusikan ke Otorita IKN,” beber Diana.

Treatment recommendation

Rekomendasi penyelesaian masalah yang dibingkai Detik.com adalah pemerintah selama 100 hari ke depan akan berfokus untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan terkait proyek IKN, khususnya yang sudah berjalan. Sementara proyek baru masih akan dibicarakan dengan Otorita IKN. Penyelesaian masalah ini dilakukan untuk memastikan bahwa proyek IKN akan dilanjutkan pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Selama 100 hari ke depan, Diana mengatakan fokus yang akan dilakukan pemerintah saat ini adalah menyelesaikan semua pekerjaan yang sudah berjalan. Kemudian, soal proyek baru masih akan didiskusikan terlebih dahulu dengan otorita IKN”.

Framing 2

Berita kedua dibingkai oleh Detik.com pada 28 Oktober 2024 dengan judul “Prabowo Kejar IKN Beres 4 Tahun, Tunjuk Basuki Lanjut Jadi Bos Otorita”. Berita ini menerangkan tentang keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang akan diselesaikan dalam waktu empat tahun ke depan. Berita ini juga menerangkan tentang penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai kepala OIKN. Berikut penjelasan *framing* terhadap berita tersebut.

Define problems.

Pendefinisian masalah pada berita ini dititikberatkan pada target penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu empat tahun oleh Presiden Prabowo. Penetapan tenggat tersebut menekankan adanya tekanan waktu yang relatif singkat untuk menyelesaikan proyek berskala besar tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.”

Diagnose causes

Masalah dalam berita ini disebabkan karena adanya ketidakpastian terkait struktur kepemimpinan Ibu Kota Nusantara (IKN) karena sampai saat ini masih belum ada jadwal pasti untuk pelantikan Otorita IKN. Ketidakjelasan ini ditakutkan akan menghambat implementasi pelaksanaan proyek IKN yang seharusnya sudah berjalan efektif untuk mencapai target empat tahun selesai. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Ketika ditanya kapan Basuki akan dilantik jadi Kepala Otorita, Prasetyo bilang belum ada jadwalnya. Bahkan hari ini pun kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto baru saja pulang dari retreat di Akmil Magelang.”

Make moral judgement

Pembingkaian moral oleh Detik.com pada berita ini adalah pengangkatan Basuki sebagai Kelapa Otorita IKN. Basuki dulunya adalah Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju yang ditugaskan sebagai Plt Kepala Otorita sejak Juni 2024. Untuk itu, kini ia dipercaya memimpin otorita IKN. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Sebelumnya Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju. Kemudian, dia ditugaskan sebagai Plt Kepala Otorita sejak bulan Juni 2024. Kini Basuki akan diangkat menjadi pejabat kepala definitif sebagai Kepala Otorita IKN.”

Treatment recommendation

Rekomendasi penyelesaian masalah yang dibingkai Detik.com adalah keputusan pemerintah yang pernah disampaikan oleh adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, bahwa Basuki akan menjabat sebagai Kepala Otorita IKN yang setingkat dengan Menteri. Tindakan penyelesaian permasalahan ini menjadi bukti keseriusan pemerintahan di era Prabowo dalam melanjutkan proyek IKN di Kalimantan Timur. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Sebelumnya, kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut-sebut setingkat dengan Menteri.”

Framing 3

Detik.com membingkai berita ketiga pada 20 November 2024 dengan judul “Dua Perintah Terbaru dari Prabowo soal Proyek IKN. Berita ini mengungkapkan tentang arahan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto mengenai proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap. Pada 2025 akan dilakukan pemindahan ASN ke IKN dengan target penyelesaian 47 tower hunian ASN. Berikut penjelasan *framing* terhadap berita tersebut.

Define problems

Pendefinisian masalah pada berita ini ditekankan pada target untuk menyelesaikan proyek IKN tahap pertama yang jatuh pada tahun 2025. Permasalahan ini menyiratkan tanda tanya apakah proyek IKN akan dilanjutkan sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan, terutama terkait ketersediaan hunian untuk ASN. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Basuki mengatakan 2025 fokusnya adalah pemindahan ASN ke IKN. Perkantoran, hunian 47 tower bagi ASN dan ekosistem pendukungnya disebut akan selesai pada Desember 2024.”

Diagnose causes.

Penyebab masalah dari pemberitaan ini adalah kapasitas hunian dan perkantoran yang belum mencukupi untuk Kabinet Merah Putih yang jumlahnya meningkat menjadi 48 kementerian. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk pembangunan tambahan agar kapasitas hunian dan perkantoran sesuai dengan kebutuhan pemerintahan baru. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Basuki mengakui hunian dan perkantoran yang tersedia saat ini masih sesuai dengan jumlah Kabinet Indonesia Maju era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni sebanyak 36 kementerian. Untuk menyesuaikan jumlah Kabinet Merah Putih yang sebanyak 48 kementerian, dipastikan akan ada pembangunan tambahan.”

Make moral judgement.

Basuki menerangkan bahwa akan ada pembangunan tambahan untuk Kabinet Merah Putih. Penilaian moral berita ini dilihat dari pemerintah Prabowo-Gibran yang saat ini memprioritaskan kelengkapan hunian dan perkantoran untuk ASN sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan fungsi pemerintahan di IKN.

“Tentunya kalau dengan kementerian tambah 48, yang siap 36, sesuai dengan jumlah kementerian Kabinet Indonesia Maju. Kalau Merah Putih nanti jadi 48, nanti rumahnya pasti juga harus kita tambahkan”, tutur Basuki.”

Treatment recommendation.

Rekomendasi penyelesaian masalah yang dibingkai Detik.com adalah pada 2025 akan dilakukan pemindahan ASN ke IKN secara bertahap. Penyelesaian masalah ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga kesinambungan proyek IKN melalui tenggat waktu sehingga pemerintahan di sana nantinya akan memiliki kesiapan dan dapat berfungsi optimal. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Basuki menyerahkan sepenuhnya jadwal pemindahan ASN ke IKN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Pastinya pemindahan itu akan dilakukan secara bertahap.”

Analisis Framing Tempo.co

Tempo.co justru memberitakan proyek IKN dengan sudut pandang yang berbeda dengan Detik.com. Tempo.co lebih banyak menyoroti keraguan terhadap

pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemberitaan di media ini mengedepankan aspek yang dipandang sebagai potensi masalah. Ada beberapa yang sering ditonjolkan oleh Tempo.co, seperti kutipan pengamat politik yang meragukan keberhasilan IKN dan penekanan pada utang negara yang semakin membesar akibat pembiayaan proyek IKN.

Framing 1

Berita pertama dibingkai oleh Tempo.co pada 20 Oktober 2024 dengan judul “Prabowo Tak Singgung IKN dalam Pidato seusai Pelantikan Presiden, PDIP: Belum Prioritas” ini menyoroti tentang pendapat Komarudin mengenai keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan sudut pandang Partai PDIP. Komarudin Watubun, Ketua DPP PDI Perjuangan, menilai bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo. Berikut penjelasan *framing* terhadap berita tersebut.

Define problems

Masalah utama yang didefinisikan dalam berita ini adalah tidak disebutkannya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada pidato pertama Presiden Prabowo Subianto setelah pelantikannya. Media Tempo.co menonjolkan fakta bahwa IKN tidak dianggap sebagai prioritas dalam agenda awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun, menilai keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Komarudin merespon Prabowo yang tidak menyinggung IKN dalam pidato pertamanya sebagai presiden.”

Diagnose causes

Permasalahan dalam berita ini disebabkan oleh kondisi keuangan negara yang terbatas. Indonesia memiliki beban utang besar senilai Rp800 triliun lebih yang akan jatuh tempo. Komarudin menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak memprioritaskan pembangunan IKN karena bersikap realistis. Ia meminta Prabowo memprioritaskan hal-hal yang lebih penting, seperti menyelesaikan beban utang negara yang segera jatuh tempo. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Komarudin mengatakan memaksakan pembangunan IKN di tengah kondisi keterbatasan anggaran hanya akan menambah beban utang. “Karena kondisinya seperti ini, pengaruh geopolitik tentu juga akan menguras tenaga. Belum lagi saat ini kita punya utang yang totalnya Rp 8.400 triliun”, ujarnya.”

Make moral judgement

Tempo.co memberikan penilaian moral terhadap kebijakan pemerintah. Pada berita di atas, pembangunan fisik seperti proyek IKN dianggap kurang tepat kondisi anggaran Indonesia mengalami keterbatasan karena memiliki utang. Media tersebut menekankan bahwa kondisi ini ada pengaruhnya dengan geopolitik. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

"Saya kira kondisinya begini, kita bertahan di Jakarta, tidak mati kan. Tapi kalau kita utamakan yang fisik-fisik, lalu rakyat menderita, harga pangan naik, segala macam naik kasihan rakyat," kata dia.

Treatment recommendation.

Rekomendasi solusi yang diberikan adalah melakukan penundaan untuk melanjutkan pembangunan IKN. Penundaan pembangunan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan kepentingan negara yang lebih prioritas, seperti membayar beban utang negara yang mencapai Rp 800 triliun. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

"Tahun depan kita harus membayar utang jatuh tempo Rp 800 triliun lebih, ini beban-beban yang harus diselesaikan Pak Prabowo. Jadi saya pikir sikap itu bagian dari prioritas mana yang penting dan mana yang tidak," katanya".

Framing 2

Berita kedua dibingkai oleh Tempo.co pada 31 Oktober 2024 dengan judul "Menteri PU Ingin Memperlambat Pembangunan IKN, Otorita: Target Tetap 2028". Berita ini menerangkan prioritas utama pembangunan IKN saat ini untuk melengkapi ekosistem yang ada dan tidak akan dilakukan pembangunan besar-besaran dalam waktu dekat. Pembangunan IKN akan berjalan lebih realistis sesuai dengan kondisi anggaran dan kebutuhan yang ada. Berikut penjelasan *framing* terhadap berita tersebut.

Define problems

Masalah yang didefinisikan pada berita ini adalah keputusan pemerintah yang menyatakan akan memperlambat laju pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Masalah ini timbul karena rasa kekhawatiran Presiden Prabowo Subianto terhadap situasi geopolitik yang semakin memanas. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

"Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan akan memperlambat laju pembangunan IKN. Hal tersebut berdasarkan kekhawatiran Presiden Prabowo Subianto terhadap situasi geopolitik yang semakin memanas. Karena itu, Dody mengatakan akan lebih memprioritaskan swasembada pangan terlebih dahulu."

Diagnose causes.

Masalah dari pemberitaan ini disebabkan karena kekhawatiran Presiden Prabowo Subianto terhadap situasi geopolitik global yang memanas. Selain itu, terdapat pendapat Dody yang menyatakan bahwa Indonesia masih belum memiliki kemampuan untuk mencapai swasembada pangan. Indonesia masih sangat bergantung pada impor beras sehingga hal ini perlu didahulukan dibandingkan dengan membangun IKN. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

"Dody menyatakan bahwa Indonesia belum mampu mencapai swasembada pangan dan masih bergantung pada impor beras, yang dikhawatirkannya dapat memicu masalah sosial yang lebih besar."

Make moral judgement

Penilaian moral yang dimunculkan dalam berita ini adalah keputusan pemerintah untuk mengutamakan swasembada pangan dan swasembada air dibandingkan dengan melanjutkan proyek pembangunan IKN. Tempo.co membingkai hal ini sebagai pilihan yang lebih etis dan bertanggung jawab karena mengutamakan stabilitas ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

"Takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak. Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan. Beras kan semua orang, kan kalau nggak makan beras seolah-olah nggak makan, jangan lah. Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada, berarti support Kementan. Itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah," ujarnya"

Treatment recommendation

Rekomendasi solusi pada pemberitaan ini adalah melakukan pembangunan IKN secara bertahap. Plt Deputy Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis, menyatakan tidak akan memperlambat pembangunan IKN. Target pembangunan IKN tetap pada 2028. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

"Plt Deputy Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Danis Sumadilaga, mengatakan tidak akan memperlambat laju pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ia menyebut, targetnya telah ditetapkan hingga 2028."

Framing 3

Berita pertama dibingkai oleh Tempo.co pada 18 November 2024 dengan judul "Menteri Hukum: Selama Infrastruktur di IKN Belum Rampung, Ibukota Masih di Jakarta". Berita ini menerangkan pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menekankan bahwa perpindahan ibu kota Nusantara baru dapat dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait. Penundaan penerbitan Keppres terjadi karena infrastruktur dasar di IKN belum rampung. Berikut penjelasan *framing* terhadap berita tersebut.

Define problems

Berita ini mendefinisikan masalah sebagai tertundanya pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Dalam hal ini, ketidaksiapan infrastruktur tersebut menjadi alasan utama bagi pemerintah untuk tidak segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres). Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

"Tito mengatakan tidak bisa memastikan kapan Presiden Prabowo akan mengeluarkan Keppres tersebut. Hal senada juga disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Dia mengatakan syarat sebuah ibukota negara yakni keberadaan kantor tiga lembaga kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif."

Diagnose causes

Penyebab dari masalah tertundanya pemindahan ibu kota ke IKN diidentifikasi sebagai ketidaksiapan infrastruktur dasar di IKN. Infrastruktur dasar

tersebut meliputi fasilitas untuk tiga lembaga kekuasaan negara yang dianggap penting untuk memastikan operasional pemerintahan berjalan efektif. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Karena itu ditegaskan bahwa lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif harus ada di sana (IKN). Selama itu belum rampung, ibukota tetap di Jakarta,” kata politikus Partai Gerindra ini.”

Make moral judgement

Penilaian moral dalam berita ini adalah keputusan pemerintah untuk menunda pemindahan ibu kota hingga infrastruktur dasar selesai. Keputusan ini dianggap menjadi langkah yang bijak dan bertanggung jawab. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Supratman mengatakan Presiden Prabowo tentu akan segera mengeluarkan Keppres begitu infrastruktur di IKN mampu menunjang operasional pemerintahan. Menurut dia, kondisi IKN saat ini belum layak dijadikan ibukota.”

Treatment recommendation

Solusi yang direkomendasikan dalam berita ini adalah pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur tersebut agar perpindahan ibu kota dapat dilakukan sebelum tahun 2029. Pembangunan IKN dilanjutkan dengan mengutamakan penyelesaian tiga pembangunan infrastruktur dasar di IKN secara bertahap. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

“Supratman menambahkan, keputusan pemindahan ibukota harus sejalan dengan progres pembangunan IKN. Dia mengatakan proses pembangunan di IKN tetap dilanjutkan oleh Prabowo.”

KESIMPULAN

Media *online* Detik.com dan Tempo.co memberitakan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dengan *framing* yang berbeda. Detik.com cenderung membingkai proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari agenda strategis nasional yang harus dilanjutkan demi keberlanjutan pembangunan dan pemerataan wilayah. Detik.com menampilkan proyek IKN dalam bingkai yang positif terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dengan menekankan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan proyek tersebut. Aspek yang disorot yaitu penambahan alokasi anggaran, penunjukan kepala otorita, dan target waktu pembangunan IKN yang jelas. Berbeda dengan Tempo.co yang membingkai proyek IKN dengan sudut pandang yang lebih kritis. Tempo.co lebih banyak menampilkan keraguan terhadap urgensi dan kelayakan proyek IKN, serta menyuarakan pendapat dari berbagai pihak, termasuk tokoh oposisi. Tempo.co mendefinisikan proyek ini sebagai persoalan yang perlu ditinjau ulang oleh pemerintah di kepemimpinan Prabowo-Gibran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, A. D. (2014). Media, Politik, dan Kekuasaan (Analisis Framing Model Robert N. Entman tentang pemberitaan hasil pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV One dan Metro TV). *Jurnal Aristo*, 2(2), 25–52.
- Entman, R. N. (1993). Framing Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4).
- Eriyanto, E. (2022). *Analisis Jejaring Wacana*. Bandung: Rosdakarya.
- Fadli, K., Waidah, D. F., & Novita, F. (2021). Konstruksi Berita “Kepulangan WNI Dari Malaysia Akibat Pandemi Covid-19 “Pada Media Online Tribun Batam. Id dan Haluan Kepri. Id. *Communicology: Jurnal Ilmu ...*, 9(1), 55–68. Diambil dari <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/communicology/article/view/17126> %0A<http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/communicology/article/download/17126/10969>
- Insani, D. F., & Zamzamy, A. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Media Online CNBC Indonesia.com dan Kompas.com Mengenai Dampak Lingkungan Pindahan Ibu Kota Negara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 2981–2993.
- Lindawati, L. (2015). Pola Akses Berita Online Kaum Muda. *Jurnal Studi Pemuda*, 4(1), 241–259.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, R. F., Naldo, J., & Riza, F. (2022). Strategi Pemberitaan Tribunmedan.com Dalam Menghadapi Persaingan Media Online. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora*, 6(1), 175–190.
- Nugraheny, D. E. (2024). Prabowo: Saya Bertekad Lanjutkan dan Selesaikan Pembangunan IKN. Diambil dari <https://kmp.im/app6>
- Nurhayati, E., Sukarno, & Setiawan, I. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai Kasus Glorifikasi Saipul Jamil. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 289–306. Diambil dari <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/communicology/article/view/23356>
- Prawira, K. Y. (2021). *Analisis Framing Pemberitaan UU Cipta Kerja oleh Kompas.com dan Antaraneews.com*. Universitas Airlangga.
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Sapahuma, N. Y. (2015). Realitas Politik dalam Media Massa (Konstruksi Pemberitaan Media Massa Seputar 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK). *Politika: Jurnal ilmu politik*, 6(1).
- Soemardi, B. W., & Waty, M. (2025). Analisis Tantangan Dan Pengelolaan Risiko Proyek Pembangunan Ibu Kota Nusantara Proyek Pembangunan Ibu Kota Nusantara, 13(September 2024), 1–8.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 7 Nomor 10 (2025) 2776 - 2792 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v7i10.8974

- Suryawati, I., & Ulfa, F. (2020). Konstruksi Berita Politainment Anggota DPR RI Mulan Jameela dan Krisdayanti di Media Online. *Jurnal Communicology*, 8(1), 18-39. Diambil dari <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/communicology/article/view/14472>
- Widyaya, I., & Setiawan, W. (2023). Analisis Framing Model Robert N. Entman dalam Representasi Publik Figur Politik: Episode "Dosa-Dosa Anies" di Program "Kick Andy" Metro TV. *Sibatik Journal*, 3(1), 103-118. Diambil dari <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>